

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara di bidang pendidikan, sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sebagai upaya memenuhi hak asasi manusia tersebut, melalui program pendidikan masyarakat, dikembangkan program pendidikan keaksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara orang dewasa dan sebagai pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Namun disisi lain, ternyata masih banyak kelompok masyarakat orang dewasa yang belum mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak, bahkan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung sekalipun. Pada akhirnya, layanan pendidikan keaksaraan ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya penduduk buta huruf.

Tabel 1.1
Data Buta Aksara Propinsi Jawa Barat 2018/2019

Buta Aksara 15-59 tahun	Indonesia	Jawa Barat
Jumlah Penduduk	170.491.084	31.507.000
Jumlah Buta Aksara	3.290.490	60.734
Persentase Buta Akssra	1,93 %	0,19 %

Sumber Data : BPS Survey Sosial Ekonomi Nasional 2018 Maret (Kor), yang sudah diolah oleh PDSPK

Dari tabel diatas, terlihat kondisi penduduk buta aksara propinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan pada tahun 2018 telah mempublikasikan kondisi data penduduk buta aksara di Indonesia. Pusat Data dan Statistik Kemdikbud menyebutkan pada tahun 2018 secara nasional prosentase penduduk buta aksara usia 15 – 59 tahun yakni sejumlah 1,93 % atau sebanyak 3.290.490 orang dari populasi penduduk Indonesia. Persebaran di tingkat provinsi khususnya provinsi Jawa Barat, angka buta aksara usia 15 – 59 tahun sebanyak 60.734 orang atau 0,19 % dari jumlah penduduk Jawa

Barat sebanyak 31.507.000 orang. Data Buta Aksara Tahun 2018 ini diperoleh dari BPS pada Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 Maret, yang sudah diolah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penduduk Buta Aksara Tahun 2018, PDSPK, 2018: hal 3). Lebih lengkapnya, data ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Data penduduk buta aksara ini memberikan gambaran mengenai kondisi persebaran penduduk buta aksara di propinsi Jawa Barat. Dari sejumlah penduduk buta aksara tersebut, sebagian besar berada pada usia produktif antara 15 hingga 59 tahun yang semestinya menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut perlu dilakukan bukan hanya pendidikan keaksaraan yang mendidik masyarakat mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pendidikan keaksaraan untuk pengembangan kemampuan individu agar mampu mengatasi persoalan kehidupan. Penyelenggaran pendidikan keaksaraan bagi masyarakat tidak hanya sekedar memberikan pendidikan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, namun juga untuk mendorong pengembangan kemampuan individu masyarakat dalam hal penguasaan informasi dan teknologi komunikasi agar dapat digunakan dan dipraktikkan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan keaksaraan merupakan salah satu layanan pendidikan yang berada di jalur pendidikan non formal dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Sebagai salah satu layanan pendidikan non formal, pendidikan keaksaraan dilaksanakan dengan sistem pembelajaran yang terencana dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang memiliki kandungan nilai fungsional untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau orang dewasa usia produktif.

Di Indonesia, program pendidikan keaksaraan dikembangkan kedalam dua layanan pendidikan antara lain pendidikan keaksaraan dasar dan pendidikan keaksaraan lanjutan. Untuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 telah menerbitkan dasar hukum melalui Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pendidikan keaksaraan lanjutan terdiri dari pendidikan keaksaraan usaha mandiri dan pendidikan multikeaksaraan. Dengan diterbitkannya Permendikbud tahun 2015 ini, kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan lanjutan di Indonesia dikembangkan dalam 2 bentuk layanan antara lain pendidikan keaksaraan usaha mandiri dan pendidikan multikeaksaraan. Layanan pendidikan keaksaraan lanjutan ini dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan keaksaraan.

Layanan pendidikan multikeaksaraan bagi masyarakat sangat berkaitan dengan adanya proses kegiatan pembelajaran keaksaraan. Kegiatan pembelajaran ini perlu diselenggarakan dalam sebuah wadah organisasi atau lembaga yang memiliki kepedulian dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat luas yang belum beruntung mendapatkan akses pendidikan secara layak. Salah satu lembaga yang tumbuh dan ada di masyarakat yang masih peduli memberikan layanan akses pendidikan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah PKBM. Lembaga PKBM termasuk ke dalam lembaga satuan pendidikan yang ada di jalur pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat. Layanan pembelajaran multikeaksaraan di PKBM dapat diselenggarakan apabila PKBM telah menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan dasar dan layanan pendidikan keaksaraan lanjutan sehingga masyarakat akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupannya

Dalam bukunya, Mustafa Kamil (2009 : 85) menyebutkan pengertian PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan diluar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini kita harus memaknai bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan lembaga satuan pendidikan Non formal yang dirintis dan didirikan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan prakarsa untuk memberikan akses layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sebagai sebuah tempat pembelajaran, didalam PKBM terdapat berbagai berbagai macam bentuk layanan kegiatan pembelajaran dan keterampilan yang memanfaatkan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, terdapat beberapa komponen pendukung pembelajaran seperti komponen tenaga pendidik, komponen peserta didik, komponen bahan ajar, komponen kurikulum, dan komponen pendukung lainnya. Bahan ajar merupakan salah satu komponen yang penting dan harus tersedia dalam proses pembelajaran karena dengan tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik akan dapat mendukung dan memperlancar proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pendidik sehingga dapat mencapai standar kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan.

Bahan ajar merupakan salah satu komponen pembelajaran yang memiliki peranan penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didiknya. Hal ini lebih jelas diungkapkan oleh Abdul Majid (2011:173) bahwa yang dimaksud bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari pernyataan diatas, menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar sangat diperlukan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi-materi belajar dalam sebuah kegiatan

pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran apabila dikembangkan secara terencana dan sesuai kebutuhan belajar serta dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran dengan benar akan dapat meningkatkan mutu hasil pembelajaran.

Selanjutnya, dasar hukum penyelenggaraan layanan pendidikan multikeaksaraan sangat jelas ditegaskan dalam Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan pada Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pendidikan Multikeaksaraan merupakan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keragaman keberaksaraan dalam aspek kehidupan. Keberagaman keberaksaraan ini menjadi salah satu fokus penekanan dan penguatan dari layanan pendidikan multikeaksaraan. Keberagaman ini dapat dikembangkan dengan mengembangkan keluasan tema-tema pembelajaran yang berkaitan langsung pada kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang telah ada, dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Keragaman tema-tema pembelajaran yang dikembangkan ini dapat bersumber dari aspek kehidupan masyarakat seperti aspek nilai agama, olahraga dan kesehatan, ekonomi, pekerjaan atau profesi serta aspek seni budaya.

Dari uraian ini menunjukkan bahwa bahan belajar pendidikan multikeaksaraan ini perlu dirancang sedemikian rupa agar relevan dan fungsional dalam membelajarkan warga belajar, sehingga di samping meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi juga mampu memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Tema dan materi belajar pendidikan multikeaksaraan harus disusun dan dikemas dalam bentuk bahan ajar yang berbasis konteks lokal yang tertuang dalam tema-tema tertentu. Penyusunan program pembelajaran pendidikan multikeaksaraan dapat diintegrasikan pada tema-tema aspek keseharian warga belajarnya yang meliputi aspek agama, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek kesehatan dan lingkungan (Tematik Integratif). Untuk itu, diperlukan kemampuan pendidik atau tutor dalam menyusun,

mengembangkan dan menggunakan bahan ajar yang diangkat dari topik atau tema potensi lingkungan sekitar dimana warga belajar hidup sehari-hari.

Ketersediaan bahan ajar dan materi pembelajaran multikeaksaraan yang memadai dalam proses pembelajaran akan sangat mendukung kualitas pembelajaran multikeaksaraan dengan baik. Ketersediaan dan pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan konteks lokal dan bersifat tematik akan dapat memperlancar dan memotivasi warga belajar dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu bahan ajar ini menjadi sarana yang dapat menghantarkan warga belajar dapat mengalami, menghayati, mengolah, mengungkapkan, menyimpulkan, menerapkan, materi-materi yang telah diajarkan dalam kehidupan keseharian.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

PKBM Hikmah yang berlokasi di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis pada awalnya hanya menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan pada tingkat keaksaraan dasar. Program pendidikan keaksaraan dasar ini tidak dilaksanakan di Desa Raksabaya tempat PKBM Hikmah berada karena warga masyarakat di sekitar Desa Raksabaya telah mampu membaca, menulis dan berhitung dengan baik. Akhirnya kegiatan pendidikan keaksaraan dasar dilaksanakan di Desa Jayaraksa dikarenakan di sekitar desa tersebut masih terdapat warga masyarakat yang buta huruf dan memerlukan layanan kegiatan belajar membaca, menulis dan berhitung. Kegiatan pembelajaran keaksaraan dasar untuk warga masyarakat Desa Jayaraksa dilaksanakan dengan membentuk kelompok belajar yang anggota warga belajarnya seluruhnya kaum perempuan usia dewasa.

Kebijakan penyelenggaraan program pendidikan multikeaksaraan telah hadir sejak tahun 2016, namun pada tataran implementasi pelaksanaan programnya belum diimbangi dengan peningkatan jumlah penyelenggara layanan pendidikan multikeaksaraan oleh lembaga-lembaga satuan pendidikan PKBM. Penyelenggaraan layanan pendidikan keaksaraan

lanjutan oleh lembaga-lembaga PKBM lebih banyak diselenggarakan pada jenis program keaksaraan usaha mandiri, termasuk PKBM Hikmah yang sebelumnya pun hanya menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar dan program keaksaraan usaha mandiri. Melihat kondisi diatas, hal ini menjadi sebuah tantangan baru bagi lembaga PKBM Hikmah agar dapat menyelenggarakan layanan pendidikan multikeaksaraan sebagai salah satu jenis layanan lainnya dari program pendidikan keaksaraan lanjutan. Hingga pada tahun 2019 PKBM Hikmah mulai menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan lanjutan dengan jenis program pendidikan multikeaksaraan.

Pembelajaran pendidikan multikeaksaraan yang baru diselenggarakan oleh PKBM Hikmah pada tahun 2019, pada awal kegiatannya belum didukung dengan perangkat pembelajaran dalam bentuk bahan ajar tematik yang akan digunakan untuk pembelajaran pendidikan multikeaksaraan di kelompok belajar yang telah ada. Dapat dikatakan, sebelum kegiatan pembelajaran multikeaksaraan dilaksanakan, PKBM Hikmah belum menyediakan dan memiliki bahan ajar untuk digunakan dalam pembelajaran multikeaksaraan. Sedangkan bahan ajar tematik yang dapat digunakan adalah bahan ajar yang mengangkat dan memilih tema/topik pembelajaran yang bersumber pada konteks kondisi dan potensi lingkungan lokal sesuai dengan minat, motivasi dan kebutuhan warga belajarnya. Selain itu, bahan ajar yang dapat digunakan harus bisa mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan baru dan keterampilan baru sesuai keadaan dan kehidupan lingkungan sekitar warga belajar.

Untuk memenuhi ketersediaan bahan ajar yang akan digunakan oleh tutor dalam kegiatan pembelajaran pendidikan multikeaksaraan dikelompok belajar Desa Jayaraksa, maka pihak pengelola PKBM Hikmah dan tutor keaksaraan berinisiatif untuk mencoba menyusun dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan minat, kebutuhan belajar dan potensi lingkungan sekitar dalam bentuk buku ajar cetak yang sederhana. Pihak PKBM dan tutor keaksaraan bersama-sama

mengidentifikasi, memilih dan menetapkan tema yang diangkat untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai materi-materi pembelajaran dalam bahan ajar yang disusun. Tema yang diangkat dan dipilih adalah Tema Pengembangan Pengetahuan Dan Teknologi dengan sub tema Pra Koperasi sehingga bahan ajar yang disusun berbentuk buku ajar sederhana bertemakan pengembangan pengetahuan pra koperasi.

Bahan ajar yang disusun berbentuk buku ajar pra koperasi dan dikembangkan oleh tutor, selanjutnya digunakan dalam pembelajaran multikeaksaraan dengan pendekatan pembelajaran berbasis penugasan hasil karya/produk. Selain materi pembelajaran yang berkenaan dengan pengetahuan pra koperasi, materi yang berkenaan dengan kemampuan keterampilan-keterampilan praktis yang sesuai potensi lingkungan sekitar kelompok belajar juga diangkat ke dalam materi kegiatan pembelajaran multikeaksaraan. Bahan ajar berbentuk buku ajar pra koperasi yang disusun dan dikembangkan oleh tutor digunakan untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan keterampilan dari warga belajar agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat gambaran uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam di PKBM Hikmah untuk mengungkap dan menggali informasi dan data mengenai tahapan mengembangkan bahan ajar dan tahapan menggunakan bahan ajar pra koperasi serta dampak penggunaan bahan ajar terhadap mutu pembelajaran multikeaksaraan. Melalui penyelenggaraan layanan pendidikan multikeaksaraan di PKBM Hikmah diharapkan dapat memberikan layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan lanjutan yang dapat meningkatkan dan memperluas keberagaman kemampuan keaksaraan warga belajarnya sesuai dengan minat, potensi dan kebutuhan belajar serta kondisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari.

Beberapa rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana strategi tutor dalam mengembangkan bahan ajar tematik di PKBM Hikmah ?
- 2) Bagaimana strategi tutor dalam menggunakan bahan ajar tematik di PKBM Hikmah ?
- 3) Bagaimana mutu pembelajaran pendidikan multikeaksaraan yang dihasilkan oleh PKBM Hikmah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

- 1) Untuk menganalisis strategi yang dilakukan tutor dalam mengembangkan bahan ajar tematik di PKBM Hikmah.
- 2) Untuk menganalisis strategi yang dilakukan tutor dalam menggunakan bahan ajar tematik di PKBM Hikmah.
- 3) Untuk menganalisis mutu pembelajaran pendidikan multikeaksaraan yang dihasilkan oleh PKBM Hikmah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

- 1) Memberikan informasi dan wawasan bagi tutor keaksaraan yang akan melakukan kegiatan mengembangkan dan menggunakan bahan ajar tematik pendidikan multikeaksaraan di lembaga PKBM lainnya.
- 2) Memberikan informasi dan wawasan bagi pengelola PKBM yang akan melakukan kegiatan mengembangkan dan menggunakan bahan ajar tematik pendidikan multikeaksaraan di lembaga PKBM lainnya.
- 3) Memberikan acuan penelitian bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian serupa ataupun lanjutan yang berkenaan dengan pengembangan dan penggunaan bahan ajar tematik pendidikan multikeaksaraan di lembaga PKBM.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis mencakup rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam tesis. mulai dari bab I sampai bab V.

Bab I berisi uraian pendahuluan dan merupakan bagian awal dari penulisan tesis, yang terdiri dari latarbelakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi tesis.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka secara konseptual teoritis. Kajian pustaka mempunyai fungsi sebagai landasan teoritik dalam membangun pemahaman secara konseptual dari pokok bahasan dalam penelitian. Dalam Bab II ini berisi tentang pembahasan teori-teori secara konseptual dan turunannya dalam bidang yang dikaji.

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data serta isu etik.

Bab IV berisi tentang Temuan dan Pembahasan, yang terdiri dari temuan penelitian dan pembahasan penelitian

Bab V menyajikan uraian penyimpulan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Penarikan dan penulisan kesimpulan dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat. Bab V terdiri dari simpulan, implikasi dan rekomendasi.